

**KINERJA LURAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
(Suatu Studi di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)¹**

Oleh : Marsel R. Rondonuwu²

ABSTRAK

Kinerja lurah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja yang selama ini dimilikinya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja sangat perlu dilakukan terhadap hasil kerja individu karena dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan pegawai, peringkat kerja, penggajian, kompensasi, promosi dan penentuan dalam jabatan.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, nampak permasalahan penelitian ini, yaitu: kinerja lurah sebagai pemimpin di kelurahan khususnya kelurahan teling atas dalam hal produktivitas kerja yaitu capaian hasil pekerjaan dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masih belum baik dilaksanakan, sesuai dengan data yang berhasil peneliti peroleh bahwa dari 679 kepala keluarga yang dikategorikan miskin dan layak menerima beras miskin (raskin) hanya 412 kepala keluarga saja yang menerima raskin, disamping itu pendataan untuk dapat menerima kartu Indonesia sehat hanya terdapat 363 orang yang telah menerima jaminan kesehatan tersebut, dalam hal motivasi lurah masih ditemukan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat, dimana lurah kurang termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala kelurahan, hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya frekuensi kehadiran lurah dikantor tepat pada waktunya, serta sering ditemukan lurah jarang berada di kantor dengan alasan rapat dengan camat, sekda, asisten dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional.

Kata Kunci : Kinerja Lurah, Kesejahteraan Masyarakat

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

PENDAHULUAN

Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat memerlukan upaya pengelolaan pembangunan yang partisipatif, pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari peran seorang lurah, oleh karena itu, sangat dibutuhkan lurah yang memiliki kinerja yang handal agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat atau meneruskan aspirasi dari keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindaklanjuti. Disamping itu peran kelurahan diatas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.

Kinerja lurah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja yang selama ini dimilikinya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja sangat perlu dilakukan terhadap hasil kerja individu karena dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan pegawai, peringkat kerja, penggajian, kompensasi, promosi dan penentuan dalam jabatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 229 ayat 3 disebutkan bahwa Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat, Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akibatnya apabila seseorang diangkat dalam jabatan sebagai lurah, masyarakat tidak bisa menolak kehadirannya karena tidak didasarkan kepada pemilihan, atau dengan perkataan lain, walaupun lurah yang bersangkutan hanya mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang rendah, tidak memiliki perhatian terhadap lingkungan kerjanya, tidak peka/tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan dari masyarakat dan organisasinya, bahkan tidak bisa memberikan peningkatan terhadap dinamika masyarakat dan kinerja dari organisasi Pemerintah

Kelurahan, masyarakat tidak mempunyai legitimasi untuk bisa menolaknya, terutama pada masa orde baru.

Pembangunan wilayah tentunya tidak terlepas dari peran serta masyarakat, sehingga lurah sebagai kepala pemerintahan harus dapat menjalankan fungsi sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang kesemuanya itu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dinamis dan telah berkembang, semakin membutuhkan aparatur pemerintahan yang professional, seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangannya. Aparatur pemerintah yang berada ditengah-tengah masyarakat dinamis tersebut tidak dapat tinggal diam, tetapi harus mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Manado dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia aparaturnya, melaksanakan pelatihan penjenjangan dan pelatihan teknis sebagai aplikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 pasal 9 tentang peningkatan aparatur pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan. Pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap baik di tingkat kecamatan. Harapan dari terlaksananya program pendidikan dan pelatihan tersebut adalah dapat meningkatkan kinerja kepala kelurahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Manado pada tahun 2015 yang lalu adalah menyerahkan kendaraan dinas berupa kendaraan roda dua kepada kepala kelurahan. Tujuan diberikannya kendaraan dinas ini sebagai upaya meningkatkan motivasi pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan dapat mendukung dan membantu Pemerintah Kota Manado dalam mempercepat proses pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para pimpinan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering para pemimpin tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga organisasi/instansi menghadapi krisis yang serius.

Pada dasarnya kinerja kepala kelurahan tidak cukup hanya dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, yang mana faktor motivasi juga berperan dalam peningkatan kinerja. Timbulnya motivasi pada diri seseorang tentunya didorong oleh kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan

sekundernya. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang termotivasi untuk giat bekerja sehingga kinerjanya dapat meningkat.

^Kinerja kepala kelurahan sebagai aparatur pemerintah di ruang lingkup Pemerintah Kota Manado khususnya tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud diatas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping faktor motivasi, juga faktor pengalaman kerja sebagai kepala kelurahan akan ikut mempengaruhi prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas ke pemerintahannya. Seorang kepala kelurahan yang sudah lama bekerja sebagai kepala kelurahan akan lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang baru bekerja sebagai kepala kelurahan dan dengan pengalaman tersebut ia akan mudah melaksanakan tugas kesehariannya sebagai aparatur pemerintah.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelurahan Teling Atas merupakan salah satu kelurahan dari 87 kelurahan yang ada di Kota Manado, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan. Sesuai dengan observasi awal peneliti menemukan masih banyak dijumpai kurangnya kesejahteraan masyarakat, hal ini diindikasikan dengan: pertama dari segi pendidikan masyarakat dimana masih banyak masyarakat yang ada belum dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas bahkan pendidikan tinggi bahkan masih banyak juga warga yang tidak tamat salah satu jenjang pendidikan atau putus sekolah, kedua dari segi kesehatan masih banyak masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, pada masa kepemimpinan walikota G.S. Vicky Lumentut terdapat program Universal Coverage yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga kota manado, namun dalam sosialisasinya tidak semua masyarakat mengetahui akan program ini, seharusnya hal ini menjadi tugas bagi pemerintah kelurahan Teling Atas untuk mendata dan mensosialisasikan program tersebut, mengingat pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak dan perpanjangan tangan dari pemerintah kota. Ketiga dari segi ekonomi terdapat masyarakat yang masih dibawah standar garis kemiskinan, dengan pendapatan rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beberapa program pemerintah seperti pemberian bantuan beras miskin (raskin) yang menjadi tanggung jawab pemerintah kelurahan, belum sepenuhnya efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dari segi penyaluran yang belum tepat sasaran, dan waktu pemberian raskin tersebut, sekali lagi harus diungkapkan bahwa seharusnya pemerintah kelurahan memiliki data keluarga-keluarga yang layak untuk menerima bantuan tersebut, namun pada kenyataannya data yang dimiliki oleh kelurahan masih berdasarkan data yang belum diperbaharui.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kinerja

Bernardin dan Russel (dalam Dwiyanto, 2002:15) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi- fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Menurut Gibson (2003:355), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ivancevich (2006:99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Siagian (1997:19) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Sinungan (2001:11), bahwa kinerja (performance) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan, yaitu tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja unit, dan kinerja pegawai. Dessler dalam Sinungan (2001:18) berpendapat: Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya.

Berdasarkan beberapa teori tentang kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Simanjuntak, 2005:29).

Menurut Wibowo (1999:67) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut: Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. Kinerja dapat berupa penampilan individu maupun kelompok kerja personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang menduduki jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga pada keseluruhan jajaran personel dalam organisasi. Selanjutnya peneliti juga akan mengemukakan tentang definisi kinerja pegawai menurut Thoha (2003:135) adalah catatan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu.

Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan. Kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat. Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya.

Ada banyak definisi dan konsep yang berbeda tentang kesejahteraan atau “well-being”. Misalnya, dapat dikatakan kesejahteraan seseorang sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan komoditas secara umum; seseorang dikatakan mampu (memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik) jika dia memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya (kekayaan). Selain itu, dapat diukur juga dari kemampuan untuk memperoleh jenis barang-barang konsumsi tertentu (misalnya makanan dan perumahan). Seseorang yang kurang mampu untuk andil (berfungsi) dalam masyarakat mungkin memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah (Sen, 1983) atau lebih rentan (vulnerable) terhadap krisis/gejolak ekonomi dan cuaca. Jadi dalam konteks ini, kesejahteraan dapat berarti adanya kemampuan memenuhi kebutuhan komoditas secara umum (yakni adanya daya beli terhadap sekelompok pilihan komoditas (Watts, Harrold W 1968) atau jenis konsumsi tertentu (misalnya kecukupan konsumsi makanan) yang dirasa sangat essential/perlu untuk memenuhi standar hidup dalam masyarakat, maupun dalam arti adanya kemampuan untuk andil/berfungsi dalam masyarakat.

Tentunya ada konsep lain dari kesejahteraan yang melebihi konsep kemiskinan (poverty), baik diukur melalui dimensi moneter maupun non-moneter. Misalnya, ketimpangan. Ketimpangan menitikberatkan pada distribusi dari atribut/variable terukur (misalnya pendapatan dan pengeluaran) terhadap seluruh

penduduk. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa posisi relatif dari individu rumah tangga dalam masyarakat merupakan aspek penting dari kesejahteraan mereka. Tingkat ketimpangan secara keseluruhan dalam suatu negara, wilayah atau kelompok penduduk, baik dalam bentuk dimensi moneter maupun non-moneter, juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan secara ringkas tentang tingkat kesejahteraan dalam kelompok tersebut. Hal ini yang perlu dicatat dari bahasan tentang kesejahteraan yaitu kerentanan (*vulnerability*). Kerentanan didefinisikan sebagai peluang atau fisik menjadi miskin atau jatuh menjadi lebih miskin pada waktu-waktu mendatang. Kerentanan merupakan dimensi kunci dari kesejahteraan karena kerentanan berakibat pada perilaku individu (dalam bentuk investasi, pola produksi, strategi penanggulangan) dan persepsi dari kondisi mereka sendiri.

Menurut Bank Dunia (World Bank 2000), “poverty is pronounced deprivation in well being”, dimana kesejahteraan dapat diukur dari kekayaan yang dimiliki seseorang, kesehatan, gizi, pendidikan, asset, perumahan, dan hak-hak tertentu dalam masyarakat tertentu seperti kebebasan berbicara. Kemiskinan juga berarti kurangnya kesempatan/peluang, ketidakberdayaan, dan kerentanan. Kemiskinan benar-benar masalah multi-dimensi yang memerlukan kebijakan dan program intervensi multi-dimensi pula agar kesejahteraan individu meningkat sehingga membuatnya terbebas dari kemiskinan.

Dengan kata lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial. Sebagai atribut agregat, kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks atas suatu lingkup substansi kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan bersifat kompleks karena multi-dimensi, mempunyai keterkaitan antardimensi dan ada dimensi yang sulit direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan sebagai suatu intensitas tunggal yang merepresentasikan keadaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan suatu representasi distribusional dari keadaan itu.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu kualitatif. Pada lazimnya suatu penulisan karya ilmiah, biasanya dengan suatu penelitian, hal ini dipandang sangat penting karena tanpa suatu penelitian, data yang dikemukakan akan sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya (Bungin, 2002:48).

PEMBAHASAN

Melihat realitas minimnya kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan konsep yang dapat menyejahterakan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, budaya, religius dan

beragam bidang lain, untuk pencapaian tersebut diperlukan suatu paradigma pemikiran tentang konsep-konsep Kesejahteraan dalam menyejahterakan masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dibidang social, maka di perlukan suatu penyusunan konsep yang ideal, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, tidak minus dibidang ekonomi yang dapat menghasilkan kemiskinan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Konsep untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, membutuhkan suatu paradigma pemikitan yang real dalam menempatkan konsep pemikiran tentang kesejahteraan social, melalui pengembangan sumberdaya masyarakat, menciptakan kondisi social yang kondusif di Indonesia, dan dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam di Negara Indonesia, untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara universal.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya . Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (social

protection) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Di Indonesia kesejahteraan sosial dijamin oleh UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34. Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terlantar tidak mendapatkan perhatian.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Produktifitas sudah cukup baik dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah di kelurahan Teling Atas. Serta tanggungjawab aparat kelurahan sudah cukup baik dimana hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparat, sikap, dan kedisiplinan yang di tunjukkan lura kepada masyarakat.
2. Kemampuan sumberdaya manusia adalah salah satu komponen yang dapat mendukung peningkatan kinerja aparat. Masalah kualitas aparatur pemerintah merupakan masalah penting dalam pelaksanaan pekerjaannya, oleh karena itu, peningkatan SDM pemerintah kelurahan merupakan hal mendesak harus dilakukan, agar pelaksanaan pekerjaannya dapat berjalan sesuai diharapkan.

Umumnya perilaku staf pemerintah Kelurahan Teling Atas kepada masyarakat lebih banyak mempersulit, ketimbang melayani. Dari hasil penelitian di lapangan terhadap staf-staf pemerintah kelurahan menunjukkan masih rendahnya kualitas. Serta sarana dan prasarana di kantor Kelurahan yang belum memadai yang menjadi aspek penting dalam mempengaruhi kinerja aparat.

Saran

1. Diperlukan adanya pembinaan yang intens bagi aparat pemerintah kelurahan untuk mendukung terciptanya aparat yang profesional dan bertanggung jawab serta memiliki kepekaan sosial dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya pihak pemerintah secara umum dan pihak pemerintah kelurahan secara khusus untuk lebih menanamkan nilai-nilai profesional, akuntabilitas, responsivitas, tanggungjawab pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo, 2002, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu: Jakarta.
- Bernardin & Russel. 2006. *Pinter Manajer, Aneka Pandangan Kontemporer*. Alih Bahasa Agus Maulana. Penerbit Binarupa Aksara. Jakarta.
- Bungin Burhan, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan dan Kebijakan, UGM.
- Dharma Agus, 2003. *Manajemen Supervisi*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Gibson, 2003. *Perilaku Manajemen Organisasi*, Erlangga: Surabaya.
- Irawan, 2001. *Manajemen Konflik*, Salemba: Jakarta.
- John Ivancevich, 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Erlangga: Surabaya
- Lukman Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta : STIA LAN Press

- Mangkunegara Prabu Anwar, 2005. *Manajemen dan Motivasi*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Monier. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Prawirosentono, 1999. *Bahasa Komprehensif Strategi Pengambilan Keputusan*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsi. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian S.P, 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sinungan, 2001 *Produktivitas: Apa dan Bagaimana, Edisi Ke-2, Cetakan Ke-3*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sinambela Lijan Poltak dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Suradinata, 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan*, Cetakan Pertama, Ramadan, Bandung.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Lembaga Studi Pembangunan LSP-STKS, Bandung
- Thoha, Miftah. 2003, *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar Aplikasinya*, Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Veithzal Rivai, 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Rajawali pers: Jakarta.
- Widjaja, 2001. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Pers : Jakarta
- Wibowo, 1999. *Manajemen Kinerja*, Rajawali Pers: Jakarta
- Winardi, 2005. *Manajemen Perilaku Organisasi*, Graha Pustaka: Jakarta
- SUMBER- SUMBER LAINNYA**
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Peningkatan
Aparatur Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pemekaran
Kecamatan dan Kelurahan